



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.12/604 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN
KEWAJIBAN MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP BUKTI PEMBAYARANNYA
BAGI MASYARAKAT PENERIMA SERTIFIKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP YANG DIANGGARKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bupati dapat memberikan pembebasan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Penerima Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Kewajiban Melakukan Verifikasi Terhadap Bukti Pembayaran bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Kewajiban Melakukan Verifikasi Terhadap Bukti Pembayaran bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya terdapat unsur kewajiban membayar pajak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- KETIGA** : Pembebasan kewajiban melakukan verifikasi terhadap bukti Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberlakukan untuk seluruh pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang Nilai Perolehan Obyek Pajaknya terdapat unsur kewajiban membayar pajak maupun tidak ada kewajiban membayar pajak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Dinas

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

DAFTAR PEMBEBASAN BPHTB
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (APBN) TAHUN 2019

O. KAS	Tahun	DESA / KEL	Kecamatan	NAMA	Proyek	NOMOR ALIAS BUK	Alias Hak	No. SPPT PBB	NIOP/ MZ		LUAS		AKUMULASI NIOP		TOTAL NIOP SEMUA
									BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	
41	2019	Kenep	Sukoharjo	PARDI PARDIYO M.	PTSL 2019	C.45 PS.6 P.II	Leter C	33.11.040.001.008-0101.0							
42	2019	Kenep	Sukoharjo	TUKINEM	PTSL 2019	C.45 PS.6 P.II	Leter C	33.11.040.001.008-0101.0							
068	2019	Kenep	Sukoharjo	PARDI PARDIYO W.	PTSL 2019	C.45 PS.18S II	Leter C	33.11.040.001.003-0033.0							
069	2019	Kenep	Sukoharjo	SUMINEM	PTSL 2019	C.45 PS.18S II	Leter C	33.11.040.001.003-0033.0							
070	2019	Kenep	Sukoharjo	LASIMEM	PTSL 2019	C.45 PS.18S II	Leter C	33.11.040.001.003-0033.0							
071	2019	Kenep	Sukoharjo	DEVI SOFYANTO	PTSL 2019	C.45 PS.18S II	Leter C	33.11.040.001.003-0033.0							
594	2019	Kenep	Sukoharjo	PARIKHO PAIRWITO	PTSL 2019	C.537 PS.15 IV.B	Leter C	33.11.040.001.001-0015.0							
596	2019	Kenep	Sukoharjo	DALMIYANTO	PTSL 2019	C.537 PS.15 IV.B	Leter C	33.11.040.001.001-0015.0							
595	2019	Kenep	Sukoharjo	WUJI RAHASJO	PTSL 2019	C.537 PS.15 IV.B	Leter C	33.11.040.001.001-0015.0							
597	2019	Kenep	Sukoharjo	SUGENG HARYANTO	PTSL 2019	C.990 PS.10S P.II	Leter C	33.11.040.001.012-0023.0							
598	2019	Kenep	Sukoharjo	TRYONO	PTSL 2019	C.990 PS.10S P.II	Leter C	33.11.040.001.012-0023.0							
603	2019	Kenep	Sukoharjo	SRI LESTARI	PTSL 2019	C.221 PS.59 P.II	Leter C	33.11.040.001.008-0014.0							
5817	2019	Kenep	Sukoharjo	SRI ISTANTO	PTSL 2019	C.221 PS.59 P.II	Leter C	33.11.040.001.008-0014.0							
5818	2019	Kenep	Sukoharjo	HARTINI	PTSL 2019	C.221 PS.59 P.II	Leter C	33.11.040.001.008-0014.0							
5819	2019	Kenep	Sukoharjo	TUTIK ISTARI	PTSL 2019	C.221 PS.59 P.II	Leter C	33.11.040.001.008-0014.0							
5820	2019	Kenep	Sukoharjo	AGUS SUPRIYANTO	PTSL 2019	C.221 PS.59 P.II	Leter C	33.11.040.001.008-0014.0							
5813	2019	Kenep	Sukoharjo	DAHMAN DARMO	PTSL 2019	C.387 PS.102 II	Leter C	33.11.040.001.012-0035.0							
5825	2019	Kenep	Sukoharjo	GITO DIHARIO	PTSL 2019	C.387 PS.102 II	Leter C	33.11.040.001.012-0035.0							
5826	2019	Kenep	Sukoharjo	WAHONO	PTSL 2019	C.387 PS.102 II	Leter C	33.11.040.001.012-0035.0							
5827	2019	Kenep	Sukoharjo	SRI DAHYANI	PTSL 2019	C.387 PS.102 II	Leter C	33.11.040.001.012-0035.0							
5828	2019	Kenep	Sukoharjo	MISGIMAN	PTSL 2019	C.387 PS.102 II	Leter C	33.11.040.001.012-0035.0							
5816	2019	Kenep	Sukoharjo	ANDIKA	PTSL 2019	C.387 PS.102 II	Leter C	33.11.040.001.012-0035.0							
5847	2019	Kenep	Sukoharjo	DUMADI	PTSL 2019	C.936 PS.113 S.II	Leter C	33.11.040.001.013-0050.0							
19184	2019	Kenep	Sukoharjo	SRI SAYEKTI	PTSL 2019	C.936 PS.113 S.II	Leter C	33.11.040.001.013-0050.0							
19185	2019	Kenep	Sukoharjo	TRININGSIH	PTSL 2019	C.936 PS.113 S.II	Leter C	33.11.040.001.013-0050.0							
19186	2019	Kenep	Sukoharjo	CATUR H.	PTSL 2019	C.936 PS.113 S.II	Leter C	33.11.040.001.013-0050.0							
19187	2019	Kenep	Sukoharjo	MARINI	PTSL 2019	C.936 PS.113 S.II	Leter C	33.11.040.001.013-0050.0							

No	Tahun	DESA / KEL	Kecamatan	NAMA	Proyek	NOMOR ALAS HAK	Alas Hak	No. SPPT PBB	NIOP / MZ		LUAS		AKUMULASI NIOP		TOTAL NIOP SEMUA
									BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	
A5															
33	2019	Ngreco	Weru	ASHI MARTANTI	PTSL 2019	C.136 PS.A.p.III	Letter C	33110100130180044							
37	2019	Ngreco	Weru	WARTONO RUSPO HARIONO	PTSL 2019	C.271 PS.d.I	Letter C	33110100130180018							
38	2019	Ngreco	Weru	SUMIVATI	PTSL 2019	C.271 PS.d.I	Letter C	33110100130180018							
39	2019	Ngreco	Weru	HARTINI	PTSL 2019	C.271 PS.d.I	Letter C	33110100130180018							
40	2019	Ngreco	Weru	SUPATNI WARTO SUKISMO	PTSL 2019	C.271 PS.d.I	Letter C	33110100130180018							
41	2019	Ngreco	Weru	SUNARTO	PTSL 2019	C.258 PS.P.III	Letter C	33110100130280044							
44	2019	Ngreco	Weru	SUGIRANTO	PTSL 2019	C.269 PS.D.I	Letter C	33110100130280044							
45	2019	Ngreco	Weru	LUCKY SUMARDI	PTSL 2019	C.269 PS.D.I	Letter C	33110100130280044							
46	2019	Ngreco	Weru	MEI LUANA HANDAYANI	PTSL 2019	C.237 PS.D.IV	Letter C	33110100130180018							
723	2019	Ngreco	Weru	SRI WUJI	PTSL 2019	C.261 PS.D.IV	Letter C	33110100130180018							
724	2019	Ngreco	Weru	ITA YULIANA	PTSL 2019	C.126 PS.P.III	Letter C	33110100130180018							
502	2019	Ngreco	Weru	SRI HANDAYANI	PTSL 2019	C.203a PS.P.III	Letter C	33110100130180018							
837	2019	Ngreco	Weru	WIJAYEM	PTSL 2019	C.134 PS.B.p.III	Letter C	33110100130280044							
838	2019	Ngreco	Weru	SRIYANI	PTSL 2019	C.261 PS.d.IV	Letter C	33110100130280044							
839	2019	Ngreco	Weru	KODIRI TRIYANTO	PTSL 2019	C.216 PS.a.P.III	Letter C	33110100130280044							
840	2019	Ngreco	Weru	MURJEM	PTSL 2019	C.216 PS.a.P.III	Letter C	33110100130180018							
841	2019	Ngreco	Weru	SURADI	PTSL 2019	C.216 PS.a.P.III	Letter C	33110100130180018							
721	2019	Ngreco	Weru	RATNA DWI SULISTYANINGSIH	PTSL 2019	C.15 PS.A.D.II	Letter C	33110100130180018							
1490	2019	Ngreco	Weru	YAMTO WIYONO	PTSL 2019	C.166 PS.P.III	Letter C	33110100130180018							
1491	2019	Ngreco	Weru	SURAT SISWANTO	PTSL 2019	C.166 PS.P.III	Letter C	33110100130280044							
1492	2019	Ngreco	Weru	LEGIYEM	PTSL 2019	C.166 PS.P.III	Letter C	33110100130280044							
1493	2019	Ngreco	Weru	NARDI SUMITO	PTSL 2019	C.166 PS.P.III	Letter C	33110100130280044							
5050	2019	Ngreco	Weru	MUHAMMAD KUSEN	PTSL 2019	C.47 PS.P.III	Letter C	33110100130180018							

